FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Bekerjasama dengan APPS
(Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah)

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL **PEMBELAJARAN SEJARAH DI TENGAH PERUBAHAN**

Editor :
Drs. Dewa Agung Gede Agung, M.Hum

ISBN: 978-602-71506-1-4

16 Implementasi Kurikulum 2013 dan Tantangan Pembelajaran Sainifik bagi Guru Sejarah	Heri Susanto	164
17 Kurikulum 2013 dan Kendala yang Dihadapi Pendidik dalam Merancang Desain Pembelajaran Sejarah	Nurul Umamah	172
18 Pembelajaran Sejarah dalam Membangun Budaya Karakter Bangsa	Sri Handayani	180
19 Kreativitas Pembelajaran Sejarah dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Sekolah	Dadang Supardan	188
20 Pendidikan, Pendidikan Sejarah, dan Dimensi Pendidikannya	Kasimanuddin Ismain	211
21 Pembelajaran Sejarah Indonesia dengan Pendekatan Postmodernisme Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Mahapeserta Didik	Lukitaningsih	219
22 Manajemen Pengembangan Metodologi Pembelajaran Sejarah ke Depan	Sumardi	225
23 Menggali Kreativitas Peserta Didik Melalui Inovasi Model <i>Issues Centered History</i> dengan Media Film dalam Pembelajaran Sejarah	Laely Armiyati	230
24 Pentingnya Pembelajaran Sejarah dengan Pendekatan PBL	Samsidar Tanjung	238
25 Penerapan <i>Problem Based Learning</i> sebagai Model Pembelajaran Sejarah dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Analisis Kritis bagi Siswa Kelas X IPS di SMA Negeri 3 Malang	Anggaunitakiranantika	247
26 Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Gaya Berpikir Terhadap Hasil Belajar Sejarah Siswa SMA	Lukman Nadjamuddin	267
27 Desain Pembelajaran Berbasis TIK	I Wayan Legawa	282
28 Pengaruh Penggunaan Multimedia Interaktif Berbasis <i>Macromedia Director MX</i> dalam Pembelajaran Sejarah Terhadap Pemahaman Konsep Candi Ditinjau dari Kesadaran Sejarah	Ulfatun Nafi'ah	292
29 Prasejarah Indonesia: <i>Recipient Culture vs Independent Invention</i>	Slamet Sujud Purnawan Jati	309
30 Sejarah dan Kedaulatan Bangsa	Dewa Agung Gede Agung	320
31 Ujian Nasionalisme Indonesia pada Awal Reformasi (Suara dari Surat Kabar)	Herry Porda Nugroho Putro	330
32 Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Tengger di Kantong Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (BTS)	Nur Hadi	339

UJIAN NASIONALISME INDONESIA PADA AWAL REFORMASI (Suara dari Surat Kabar)

Oleh: Herry Porda Nugroho Putro.
FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Email: pordabanjar@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia terus mendapat ujian dalam hal berbangsa dan bernegara. Reformasi sebagai babakan baru dalam sejarah Indonesia telah merubah kondisi bangsa Indonesia, yaitu desentralisasi. Sistem sentralisasi pada jaman orde baru ternyata telah membelenggu kebebasan bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah di luar Jawa. Keterbukaan pada era reformasi, ternyata diawali dengan suasana kebebasan yang berlebihan. Beberapa daerah merasa dirugikan selama kekuasaan orde baru, beberapa daerah merasa diperlakukan tidak adil secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat gambaran kekacauan bahkan terjadi konflik di berbagai daerah di Indonesia, serta keinginan untuk merdeka. Peristiwa pada awal reformasi menyadarkan akan hakikat nasionalisme, sehingga perlu dilakukan revitalisasi nasionalisme agar peristiwa tersebut tidak terulang lagi. Revitalisasi nasionalisme diperlukan, karena bangsa Indonesia selanjutnya dihadapkan pada globalisasi yang dapat berpengaruh pada jati diri bangsa.

Kata kunci: reformasi, nasionalisme, etnis, revitalisasi.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia dalam perjalanannya mengalami pasang surut nasionalisme. Reformasi sebagai babakan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia telah menghasilkan bentuk-bentuk perubahan. Orde baru yang sentralistik dirombak kearah demokrasi. Atmosfer demokrasi terkesan memayungi kehidupan Bangsa Indonesia sejak reformasi.

Demokrasi berkembang pada semua aspek kehidupan, dalam ranah politik muncul berbagai partai politik, dan pemilihan langsung legislatif dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pemilihan langsung juga pada pemilihan legislatif (Presiden hingga Walikota/Bupati). Masyarakat bebas menyampaikan pendapat, baik pendapat pada pemerintah maupun pendapat umum. Reformasi ibarat terpancarnya air dari kesumbatan pada masa orde baru.

Ironisnya pada awal reformasi keterbukaan demokrasi memunculkan bayang-bayang disintegrasi beberapa daerah, seperti Aceh, Riau, Maluku, Papua dan lain-lain. Berujung pada peristiwa konflik di beberapa daerah seperti Poso, Sampit, Maluku, Papua.

Kehidupan berbangsa tergerus terlihat pudarnya pandangan hidup bangsa Pancasila, Jarang Pancasila disinggung dalam pertemuan-pertemuan, media massa, maupun media elektronik, para pelajar mulai tidak mengenal Pancasila. Hal ini berakibat pada kehidupan bangsa yang nampak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (korupsi, menyindir pemerintah, saling mengejek) terkesan kepribadian bangsa pudar. Bendera merah putih sebagai simbol Negara juga kurang dihormati. Pada setiap Proklamasi 17 Agustus sebagian besar rumah di berbagai daerah tidak mengibarkan bendera merah putih, bahkan kampung-kampung sebagian besar tidak menghias dengan bendera merah putih.

Phenomena tergerusnya nasionalisme Bangsa Indonesia pada awal reformasi penting dikaji kembali, karena ketidak harmonisan elemen-elemen suatu bangsa ternyata dapat menimbulkan kerawanan yang dapat berujung pada perpecahan. Awal reformasi telah menunjukkan arti penting nasionalisme bagi Bangsa Indonesia yang saat ini sering terjadi pergolakan akibat kepentingan salah satu golongan atau kelompok.

B. Bayang-Bayang Disintegrasi Awal pada Reformasi

Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di Indonesia pada awal reformasi demikian mencemaskan. Di berbagai daerah terjadi gejolak, seakan mereka bebas menentukan jalannya sendiri. Kerusuhan timbul di berbagai tempat, dengan nuansa agama, suku atau SARA.

Bila kita buka lembaran surat kabar seperti Kompas (29 September 2001) tergambar kebijakan politik terhadap Aceh telah menimbulkan gejolak, disebabkan pelanggaran HAM dan keinginan Aceh untuk merdeka. Sebagai daerah istimewa Aceh kurang mendapat keadilan bahkan semakin menyedihkan. Lembaran Tempo (26 Januari 1999: 62) pernah memberitakan konflik vertikal antara masyarakat lokal dengan pemerintah yang sah terjadi di Irian Jaya atau Papua, Rakyat Irian Jaya dalam hal ini Propinsi Papua sebagian besar mempunyai keinginan yang kuat untuk merdeka, dalam arti memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan: (1) tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, (2) diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif, (3) tidak pernah menikmati sumber kekayaan alam di bumi Papua yang merupakan miliknya sendiri, (4) selalu ditindas dan banyak yang dibunuh bila menuntut

hak-haknya, (5) menolak proses integrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar PEPERA (penentuan pendapat rakyat), (6) mempertaruhkan pernyataan politik Konggres Papua, (7) Rakyat Papua akan berjuang terus dengan cara damai. Rakyat Papua merasa bahwa dengan model negara sekarang ini, rakyat Papua bukan hanya tidak dianggap orang, tapi tidak dianggap untuk orang Indonesia. Irian merasakan penjajahan ekonomi di bawah Orde Baru. Hasil pertambangan yang tak terhingga banyaknya tidak sampai lima persen yang dikembalikan kepada penduduk Irian sebagai miliknya.

Seminar tentang timur dan barat Indonesia memberikan gambaran bahwa pada awal reformasi telah timbul konflik vertikal dan horizontal terutama di kawasan timur Indonesia, konflik terbesar dan terlama adalah di Maluku. Rangkaian kerusuhan di Maluku tidak lain merupakan ledakan depresi dan frustrasi yang dialami setiap anggota masyarakat. Depresi dan frustrasi yang kurang disadari serta tidak ditanggapi dan dikelola dengan baik ini, meledak bersamaan berkembangnya keterbukaan politik yang datang melalui reformasi 1998. Konflik yang terjadi Pulau Kalimantan merupakan konflik antar kelompok etnis (pendatang dan penduduk asli). Rangkaian konflik ini lebih banyak disebabkan kesenjangan ekonomi. Sedangkan ketegangan di wilayah NTT cukup bervariasi misalnya perang tanding perebutan tanah, penyebaran penyakit rabies, kerusuhan sporadis, dan hiruk pikuk kaum pengungsi Timor Timur. Untuk sebagian, diyakini bahwa konflik-konflik ini adalah akibat ulah para provokator, yang sejauh ini belum terungkap tuntas (laporan seminar, 2001 : 254).

Manan (2001: 278) mengatakan bahwa kekuasaan Negara yang sentralistik, totaliter merupakan sumber kerusakan, sentralistik telah melahirkan tuntutan dari berbagai daerah untuk melepaskan diri dari ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Harian Pikiran Rakyat (30 Oktober 2001) memberitakan bahwa pemahaman tentang Otonomi Daerah yang keliru menyebabkan berkembang kecenderungan semangat kedaerahan yang sempit dan berlebihan, sering muncul simbol-simbol primordialisme dengan istilah-istilah seperti putra daerah, egoisme kesukuan atau etnik dan bahkan agama. Sikap primordial dan kesukuan serta individualisme dalam masyarakat terlihat kurangnya rasa kepedulian ketika terjadi masalah di suatu daerah, tidak melihat persoalan sebagai masalah politik dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Lokalitas dalam bingkai otonomi daerah pada awal reformasi sebenarnya tujuannya agar terdapat keseimbangan antara daerah dan pusat untuk memelihara negara kesatuan dan memberi kesempatan pada daerah untuk berperan. Ternyata muncul *eksklusivisme* hubungan antar daerah, masing-masing daerah berlomba mengatur dirinya sendiri demi kepentingan daerahnya; kondisi ini mengakibatkan permasalahan mobilitas: sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Daerah-daerah terlihat banyak berpikir lokal. Konflik di daerah-daerah, seperti Kalimantan Tengah (Sampit), Irian Jaya, bahkan lepasnya Timor-Timur merupakan indikasi terhadap salahnya pemahaman tentang konsep lokalitas pada awal reformasi.

Menarik yang dikatakan Tholkhah (2001: 218) bahwa terjadinya ketegangan politik vertikal fokusnya bukan berkenaan dengan masalah-masalah agama ataupun ekonomi, tetapi mengenai demokrasi, korupsi, kecurangan dalam pemilu, dan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Ketegangan politik dipicu oleh sifat kekuasaan dan perilaku elit penguasa, disamping sifat rezim militer yang otoriter.

Adanya keinginan disintegrasi melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, juga disebabkan sentralisme yang berlebihan pada masa Orde Baru (bahkan juga Orde Lama). Sentralisme atau pemusatan kekuasaan sebenarnya adalah tradisi politik pada masa Hindu-Buda di Jawa (Makrokosmos dan Mikrokosmos) (Gerdern, 1985), dan ini telah berlangsung hampir setengah abad di Indonesia, model ini tidak dikenal dalam tradisi politik di luar Jawa. Jawa sepertinya menguasai segenap sektor kehidupan. Daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus menuruti kehendak pusat (Manan, 2001: 4). Urusan rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba tergantung pada kebaikan hati pusat. Perlakuan ini menimbulkan kekecewaan luar biasa pada daerah yang pada dasarnya menyangkut etnisitas di luar Jawa.

Dalam bidang ekonomi terjadi ketidakadilan, sehingga terjadi: (1) perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; (2) perluasan batas-batas kelompok sosial budaya; (3) benturan kepentingan politik, ideologi dan agama (Coser, 1972). Pada masa Orde Baru, peranan suku bangsa dalam bidang pembangunan di daerah-daerah kurang diperhatikan. Terkesan suku-suku bangsa di daerah-daerah dianggap kurang mampu. Eksploitasi sumber daya alam tidak banyak melibatkan suku-

suku bangsa di daerah. Terhadap eksploitasi, suku-suku bangsa di daerah-daerah hampir tidak menikmati hasilnya, mereka diperlakukan sebagai penonton.

Sumber daya alam kurang menetes di daerah-daerah penghasil sumber daya alam seperti: Aceh, Papua, Kalimantan, daerah-daerah ini tetap miskin. Industrialisasi terpusat di Jawa, sedangkan rakyat di daerah-daerah kesulitan mencari pekerjaan. Nasionalisme kedaerahan semakin kuat ketika penyumbang paling besar kepada kekayaan negara menjadi cemas karena ternyata sumbangan mereka dijarah oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah yang korup (Soetrisno, 1999 : 58). Sistem sentralistik dalam pemerintahan dan pembangunan telah menyebabkan terjadinya ketimpangan antar propinsi. Sejumlah propinsi kaya (penyumbang besar) seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur justru hanya mengonsumsi sebagian kecil dari pendapatannya. Lembaran Suara Pembaruan memberitakan (4 Juni 1999) bahwa proses pembangunan telah menempatkan Indonesia bagian timur menjadi kepentingan objek ekonomi pengusaha dan penentu kebijakan kota-kota besar dari Indonesia bagian barat tanpa mengikutsertakan kehendak aspirasi masyarakat setempat dalam pembangunan. Kemunduran ekonomi dan sosial Indonesia Timur salah satunya disebabkan eksploitasi kalangan masyarakat pengusaha (terutama dari Jawa) dengan menggunakan legitimasi kekuasaan (pemerintah pusat) memperluas jaringan tata-niaga di berbagai pusat perdagangan Indonesia bagian Timur.

Kondisi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia disebabkan perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi, rekayasa sosial dan perlakuan diskriminatif sejak pemerintahan rezim Orde Baru. Kesenjangan sosial ekonomi dan perlakuan diskriminatif terkesan dipaksakan, sehingga menyebabkan kelompok tertentu merasa diperas dan dipinggirkan serta diperlakukan tidak adil. Sementara kelompok lain menikmati hak-hak istimewa secara tidak wajar dan bersikap angkuh dan represif (Pelly, 1999 : 27).

Sudut budaya lokal pada awal reformasi terkesan terjadi pengentalan etnisitas (Kompas, 21 Maret 2001) padahal pada masa orde baru budaya lokal diabaikan karena dianggap tradisional, dan tidak menunjang proses pembangunan. Eksistensi budaya lokal nyaris punah, terkesan terjadi krisis identitas.

C. Revitalisasi Nasionalisme

Membicarakan nasionalisme pada era kini terasa sesuatu yang membosankan, sesuatu yang dianggap usang. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi dan pembahasan yang dapat mengarah pada bentuk fundamental nasionalisme bagi suatu bangsa. Kondisi sosial-politik akhir-akhir ini menjadi indikator perlunya revitalisasi dan reaktualisasi nasionalisme dalam berbagai aspek kehidupan.

Nasionalisme bila dicermati dari beberapa pendapat merupakan paham kebangsaan, konotasinya adalah rasa cinta terhadap tanah air. Nasionalisme tumbuh berdasarkan perjalanan sejarah dan persamaan nasib untuk membentuk suatu negara. Renan (1965: 135-140) mengatakan “*A nation ... a spiritual principle, ... A nation is a great solidarity, created by the sentiment of the sacrifices which have been made and of those which one is disposed to make one in the future.*” Soedjatmoko (1984) mengatakan bahwa nasionalisme adalah pernyataan kemauan suatu bangsa untuk menegaskan kembali identitasnya. Bangsa muncul sebagai hasil dari proses sejarah, semua bangsa mempunyai sejarah yang terjadi sebelumnya, komunitas awal bersejarah merupakan komponen penting dalam pembentukan bangsa (Grosby, 2009). Anderson (1999: 7) melihat bahwa suatu bangsa adalah *imaginer*, para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak tahu dan tidak kenal dengan sebagian besar anggota lain, tetapi setiap individu bangsa tersebut memiliki bayangan tentang kebersamaan mereka. Ditegaskan oleh Arnold Toynbee (Perry: 1982: 63) bahwa nasionalisme berhubungan dengan tindakan dan cara berpikir individu sebagaimana keseluruhan masyarakatnya.

Kehidupan nasionalisme Indonesia yang dilahirkan dalam kancah perjuangan perintis kemerdekaan pada masa kolonial dan diteruskan oleh perjuangan fisik selama revolusi menuntut suatu kontinuitas di masa depan, karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya masih memerlukan pemantapan atau perealisasi selama proses *nation-building* di Indonesia masih berjalan terus (Kartodirdjo, 2002). Aspek *Kontinuitas* dapat dipelajari dari sejarah bangsa Indonesia, sebab perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan kelanjutan dan perubahan yang bersifat kualitatif. Kekuatan-kekuatan perjuangan bangsa Indonesia pada saat mencapai kemerdekaan perlu terus dikobarkan, karena merupakan kekuatan raksasa untuk mencapai cita-cita kemerdekaan (Simatupang, 1981: 21).

Nasionalitas mengalami perubahan pemaknaan, terutama bagi dua generasi kepemimpinan yaitu generasi kemerdekaan (1904-1945) dan generasi kesejahteraan (*welfare*) (1967) hingga sekarang.

Dari skema di atas nampak bahwa muncul dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia pada tahun 1904-1945 akibat kolonialisme dan penjajahan Jepang, nasionalisme semakin kuat menjelang kemerdekaan dan puncaknya terjadi pada masa kemerdekaan. Nasionalisme Bangsa Indonesia adalah gejala historis akibat dari kekuasaan kolonial bangsa barat dalam konteks situasi kolonial, nasionalisme Indonesia adalah suatu jawaban terhadap syarat-syarat politik, ekonomi, sosial yang ditimbulkan oleh situasi kolonial (Kartodirdjo, 1972: 57). Perlawanan terhadap kolonialisme memiliki ciri yang berbeda pada beberapa babakan, misalnya pada perlawanan terhadap VOC, Hindia Belanda, atau sebelum tahun 1908. Perlawanan terkesan perang terbuka dengan menggunakan senjata tradisional, sifat perlawanan kedaerahan. Motif perlawanan di setiap daerah adalah sama, yaitu menentang kolonialisme Belanda. Selanjutnya sejak 1908 nasionalisme mulai terajut, perlawanan terhadap Belanda melangkah modern melalui organisasi-organisasi pergerakan nasional.

Pendudukan militer Jepang selama tiga setengah tahun, ternyata mematangkan jiwa patriotik pemuda-pemuda Indonesia. Mobilisasi kepentingan militer Jepang, seperti

heihō, seinendan, keibondan, fujinkei sebenarnya telah menumbuhkan nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia, karena mendapat pengalaman dari latihan kemiliteran. Pemuda-pemuda Indonesia selama menjadi anggota Peta mendapat pengalaman, gemblengan-gemblengan di dalam *daidan* peta memberikan mereka kepercayaan kepada diri sendiri bahwa merekapun mampu berjuang melawan kekuatan yang lebih kuat dan lebih terlatih. Orang Jepang secara tidak langsung telah memperlihatkan pada Bangsa Indonesia bahwa sebagai orang Asia mereka tidak hanya dapat tegak berdiri sebagai bangsa merdeka, melainkan mampu mencapai tingkat yang sama dengan orang Barat (Notosusanto, 1975). Bukti kematangan nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia, adanya gerakan anti Jepang, pemberontakan Peta, gerakan di bawah tanah, penyusunan dasar negara, penyusunan piagam Jakarta, dan Proklamasi kemerdekaan.

Nasionalisme Indonesia telah terajut dan menjadi kain indah, ketika rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Jiwa nasionalisme Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi Nasionalisme Indonesia merupakan produk historis di masa lampau, yang secara nyata gejalanya nampak pada masa pergerakan nasional 1908 – 1942. Jiwa nasionalisme Indonesia setelah kemerdekaan harus dikembalikan kepada terbentuknya negara-negara nasional Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan pandangan hidup bangsa yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sejak tahun 1967 masa pembangunan nasional nasionalisme Indonesia diarahkan pada pembentukan *nation building*. Arah ini terlihat pada setiap kebijaksanaan dalam pemerintahan, pendidikan, sosial, ekonomi. Dengan kekuatan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dibawa ke arah pembangunan nasional. Tetapi nampaknya semangat nasionalisme mengalami kemerosotan, sehingga makna nasionalisme sepertinya bergeser. Ini sebagai akibat modernisasi di Indonesia yang menampilkan dua dimensi dalam dua jalur perkembangan (Kartodirdjo, 1987), yaitu: (1) perkembangan ideologi khususnya nasionalisme Indonesia, (2) perkembangan teknologi yang pada masa orde baru meningkat besar-besaran; ketidak selarasan kedua jalur tersebut akibat dominasi industrialisasi dalam kehidupan bangsa mengakibatkan memudarnya martabat dan kepribadian bangsa. Nasionalisme saat ini dipengaruhi oleh: (1) terdesaknya kebudayaan simbolisme oleh kebudayaan materialisme yang berorientasi kebendaan, dan (2) penerimaan suatu paham sebagai ideologi negara (Pancasila), tetapi tidak menolak adanya

ideologi-ideologi lain (materialisme, liberalisme, individualisme dan lain-lain) dalam pandangan hidupnya, sehingga timbul dilema antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme asing.

Bangsa Indonesia dalam perjalanannya tanpa kehilangan rasa kenasionalan dan patriotisme, berada pada pasca-nasional, artinya telah hidup pada jaman atau generasi sesudah Indonesia, tetapi tetap terkait dan merupakan kelanjutan dari nasionalitas Indonesia yang lebih meningkat. Mereka tetap sebagai bangsa Indonesia, tetapi bukan bangsa Indonesia seperti dulu. Identitas sebagai bangsa Indonesia masih tetap, tetapi meningkat dan bertambah dimensinya, cakrawalanya meluas dan mendalam, lebih bersifat universal atau supra nasional. Nilai-nilai nasionalisme harus dipandang dari konteks waktu, dalam waktu yang berbeda terdapat aktualisasi yang berbeda. Pada masa 1908-1942 nasionalisme terwujud dalam keinginan untuk mewujudkan kesatuan bangsa dan mencapai kemerdekaan. 1945-1950, nasionalisme terwujud dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, aktualisasi nasionalisme bukan lagi penentangan terhadap kolonialisme, mewujudkan kesatuan bangsa atau mencapai kemerdekaan, melainkan bagaimana mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pada saat sekarang ini (globalisasi) telah terjadi peregeseran dalam pengertian nasionalisme. Tidak lagi berdasarkan ideologi-ideologi yang pernah kita kenal awal tahun 1970-an dan 1950-an. Nasionalisme sekarang menjadi *nasionalisme kapital yang berorientasi kepada pasar* (Laksono, 2001: 5). Sementara pasar global dikuasai oleh negara-negara industri, yang tetap ingin mempertahankan hubungannya dengan negara penghasil bahan mentah. Jadi, dalam situasi global yang terjadi sekarang negara-negara seperti Indonesia sebagai negara dunia ketiga terpuruk sebagai produsen bahan-bahan mentah untuk kepentingan industri di negara maju. Munculnya kecenderungan kerusuhan yang bersifat etnik, sebagai munculnya *politik identitas etnik* dalam etnisitas masing-masing; hal ini bisa merupakan krisis nasionalisme atau karena saat ini kita tidak punya *common dinamisator* (Prasentyantono, 2001: 141) nasionalisme. Konflik etnis yang terjadi di daerah-daerah, disebabkan kita tidak berhasil membangun suatu nasionalisme selama Orde Baru.

D. Penutup

Berbagai peristiwa pada awal reformasi di Indonesia pada dasarnya akibat dari model politik pada orde baru, sentralistik dan tidak merata dalam pembangunan. Kondisi ini menjadi ujian berat Bangsa Indonesia, agar tidak terjadi perpecahan.

Integrasi nasional dalam bingkai nasionalisme Indonesia perlu dirajut kembali, menarik yang dikatakan Wang Gungwu (2005: 13):

Nation building is an immediate and pressing task in Southeast Asia. It started in earnest from the day after the celebrations were over and the new leaders of new governments got down to work. The nationalist slogans that promises a great new beginning had now to be translated into policies and actions that not only confirmed the power of the state but also launched the project to make nationals of every citizen.

Dalam konteks Negara Indonesia Oommen T.K (2009: 36) memberikan pandangan keterbukaan seperti berikut:

...Negara dapat dibayangkan sebagai kolektivitas warga Negara yang memiliki status sipil, politik, dan social tertentu dan jelas. Elemen sipil memberikan warga negara kebebasan individu; sedangkan elemen politik menyediakan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik; sementara itu elemen social adalah elemen yang menjamin kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Periode demi periode telah dilalui oleh Bangsa Indonesia, demokrasi dengan berbagai bentuk telah dilakukan. Perlu dirumuskan kembali bentuk demokrasi yang dapat memperkuat nasionalisme, bukan sebaliknya (menggerus nasionalisme). Hal fundamental yang harus menjadi perhatian utama adalah jati diri bangsa.

Pendidikan sejarah perlu direvitalisasi dengan penekanan pada pemupukan nasionalisme. Subtansi dan model pembelajaran sejarah hendaknya dikaji kembali, sehingga peserta didik memiliki kesadaran sejarah. Selanjutnya siswa sadar akan perjalanan bangsanya, mengenal bangsanya, tumbuh rasa kebangsaannya.

Daftar Pustaka

Anderson, B. (1999). *Komunitas-Komunitas Imajiner: renungan tentang asal-usul dan penyebaran Nasionalisme*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Gerdens, H. (1985). *Konsepsi Tentang Negara di Asia Tenggara*. Jakarta : Rajawali.
- Grosby, S. (2009). *Sejarah Nasionalisme Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, S. (1972). *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad 19 & Abad 20*. Yogyakarta: UGM.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pembangunan Bangsa*. Yogyakarta : Aditya
- Kartodirdjo, S. (1999). *Multidimensi Pembangunan Bangsa : Etos Nasionalisme dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kleden, I. (2001). “Dari Stabilitas Nasional ke Stabilitas Sosial”. Dalam Laporan Seminar *Timur dan Barat di Indonesia Perspektif Integrasi Baru*. Jakarta : The Go-East Institute.
- Laksono, P.M. (2001). “Globalisasi, Etnisitas dan Tantangan Konsep Nasionalisme”. *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Laporan Seminar. (2001). *Timur dan Barat di Indonesia Perspektif Integrasi Baru*. Jakarta : The Go-East Institute.
- Manan, B. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII-Press.
- Notosusanto, N. (1974). *Sejarah Nasional V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Oommen, T.K. (2009). *Kewargaanegaraan, Kebangsaan, & Etnisitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Offset.
- Pelly, U. (1994). *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta : Dikti.
- Perry, M. (1982). *Arnold Toynbee and The Crisis of The West*. Washington: University Press of America, Inc.
- Prasentyanono, A. T. (2001). “Globalisasi dan Demokrasi dalam Ekonomi Indonesia. *Nasionalisme Etnisitas*. Yogyakarta : Kanisius.
- Renan, E. (1965). Dalam Kohn, H. *Nationalism, Its Meaning and History*. Florida: R.E. Krieder & Coy.
- Sartono Kartodirdjo (2002). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Simatupang, T. B. (1981). *Arti Sejarah Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Soedjatmoko (1984). “Antara Filsafat dan Kesadaran Sejarah” dalam William H. Frederick dan Soeri Soeroto. (1982). *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta : LP3ES
- Soetrisno, L. (1999). “Mencegah Disintegrasi”. *Tempo*, Edisi 26 Januari-1 Februari 1999, hal. 58.
- Tholkhah, I. (2001). *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Wang Gungwu (2005). “Contemporary and National History: A Double Challenge.” Wang Gungwu (ed). *Nation-Building Five Southeast Asian Histories*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Surat Kabar

“*Debat Negara Federal*”, *Tempo*, edisi 26 Januari-1Februari, 1999. Hal. 62.

“*Tiga Batalyon Amankan Exxon Mobil*”, *Kompas*, 26 September 2001, hal. 1.

“Sekeluarga Dibantai di Pidie”, Kompas, 29 September 2001, hal. 19.

“Prioritas, Penghentian Kekerasan di Aceh”, Kompas, 29 September 2001, hal. 6.

Internet

(1999, 3 Mei). Ben Anderson : Pemerintah Harus Mengatasi Kemajemukan. Suara Pembaharuan [Online]. Tersedia: [http://www. Indomedia.com](http://www.Indomedia.com). [8Nopember 2001].

((1999, 4 Juni). Indonesia Timur: Korban Eksploitasi Kapitalisme Cukong. Suara Pembaharuan [Online]. Tersedia: [http://www. Indomedia.com](http://www.Indomedia.com). [8Nopember 2001].

(2001, 17 Nopember). Otonomi Diributkan karena Inti Persoalan Tidak Dipahami. Kompas [Online]. Tersedia: [http://www. Kompas.com](http://www.Kompas.com). [8Januari 2002].

(2001, 21 Maret). Konflik Antar Etnis Ujian Bagi Budaya Lokal. Kompas [Online]. Tersedia: [http://www. Kompas.com](http://www.Kompas.com). [8Nopember 2001].